RESEARCH/REVIEW ARTICLE

Instrumentalisasi sentimentalitas, teror massa dan problem keadilan politis dalam negara: sebuah diskursus tentang resesi demokrasi dan akar keterbelahan bangsa yang mengancam NKRI

Instrumentalization of sentimentality, mass terror and problems of political justice in the state: a discourse on democratic recession and the roots of national divisions that threaten the Republic of Indonesia

Mickhael Rajamuda Bataona

Universitas Katholik Widya Mandira Kupang

* Corresponding author: Mickhael Rajamuda Bataona
E-mail: erlandlamalera@gmail.com

Naskah Diterima : 20 Agustus 2016; Di-review : 22 Agustus 2019; Dimuat: 30 Agustus 2019

Copyright ©FLOBAMORA 2019

Abstract

This study discusses the issue of sentimentality, the rise of political populism and right populism which are becoming a new trend in political and democratic practices in Indonesia, as well as the problem of political justice in the state. The analysis knives used are: the concept of Mass, Ratsio Instrumental, Sentimentality, Integration and Disintegration, Conflict, Pre-Political and Political Justice, and Democracy. This study uses a qualitative-descriptive approach with a combination of case study methods for secondary data (documents). The results of the study are mapped into 6 subjects, namely: 1). Political Resurgence of Population and Mass Terror: Indonesian Case Study, 2). Disputes of Fukuyama's Claims About the Victory of Liberal Democracy, 3). The Collision Between Pre-Political Justice And Political Justice, 4). Oikos Rules Invade the Policy Life, 5). Right Populism and Instrumentalization of Sentimentality Which Ended in Brutality, 6). Maintaining the Homeland, Anticipating the Syndrome of Oppressed People and Fundamentality. Broadly speaking, the results of the study indicate that, populism politics through an angry mass movement is to pressure the government, dictate the court and the legal apparatus as well as attacking the procedure of democracy. Right populism also threatens the Republic of Indonesia. Francis Fukuyama's thesis is refuted because democracy can go backwards. This study concludes, democracy remains the best choice for Indonesia. NKRI can be saved by increasing public rationality, the existence of double learning or mutual learning between secularism and religion, upholding the law as a seat belt for democracy including managing traffic in cyberspace with strict laws, and anticipating the emergence of the phenomenon of "oppressed syndrome" in the fight political.

Keywords : Ratsio Instrumental; Sentimentality; Mass; Political justice; Democracy and Disintegration.

Abstrak

Kajian ini mendiskusikan persoalan sentimentalitas, kebangkitan politik populisme, dan populisme kanan yang sedang menjadi trend baru dalam praktek politik dan berdemokrasi di Indonesia, serta masalah keadilan politis dalam bernegara. Pisau analisis yang digunakan adalah: konsep Massa, Ratsio Instrumental, Sentimentalitas, Integrasi dan

Disintegrasi, Konflik, Keadilan Pra Politis Dan Keadilan Politis, dan Demokrasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan kombinasi metode telaah kasus terhadap data-data sekunder (dokumen). Hasil kajian dipetakan dalam 6 pokok bahasan, yaitu: 1). Kebangkitan Politik Populisme dan Teror Massa: Studi Kasus Indonesia, 2). Terbantahnya Klaim Fukuyama Tentang Kemenangan Demokrasi Liberal, 3). Tubrukan Antara Keadilan Pra Politis Dan Keadilan Politis, 4). Aturan *Oikos* Menginvasi Kehidupan *Polis*, 5). Populisme Kanan dan Instrumentalisasi Sentimentalitas Yang Berujung Brutalitas, 6). Menjaga NKRI, Mengantisipasi Sindrom Orang Tertindas Dan Fundamentalitas. Secara garis besar hasil kajian menunjukkan bahwa, politik populisme lewat gerakan massa yang murka adalah untuk menekan pemerintah, mendikte pengadilan dan aparat hukum juga menerjang prosedur demokrasi. Populisme kanan juga mengancam NKRI. Tesis Francis Fukuyama terbantahkan karena demokrasi bisa berjalan mundur. Kajian ini menyimpulkan, demokrasi tetap menjadi pilihan terbaik untuk Indonesia. NKRI bisa diselamatkan dengan meningkatkan rasionalitas publik, adanya belajar ganda atau saling belajar antara sekularisme dan agama, menegakan hukum sebagai sabuk pengaman demokrasi termasuk menata lalu-lintas komunikasi di dunia maya dengan hukum yang tegas, dan mengantisipasi munculnya fenomena “sindrom orang tertindas” dalam pertarungan politik.

Keywords : Rasio Instrumental; Sentimentalitas; Massa; Keadilan Politis; Demokrasi dan Disintegrasi.

1. Pendahuluan

Seratus tahun silam, filosof Friedrich Nietzsche sudah menulis sebuah tesis menarik tentang massa dan kerumunan. Menurut Nietzsche, “Massa adalah pertama-tama, salinan kabur orang besar. Kedua, pembangkangan melawan orang besar, dan ketiga, alat orang besar”¹ Tentang aksi massa ini, terutama kebangkitan gerakan massa yang murka untuk menekan pemerintah, dalam dua dekade terakhir, juga sedang terjadi secara internasional. Inilah fenomena politik yang dalam studi ilmu politik disebut sebagai kebangkitan politik populisme. Dari sekian banyak wujud politik populisme, yang terjadi di Indonesia lebih cenderung disebut kebangkitan populisme kanan. Yaitu penggunaan kekuatan massa terutama yang murka karena diprovokasi dengan isu agama, kemudian dibelokan menjadi alat politik.

Secara global, politik populisme sendiri masih digunakan di banyak negara di dunia dalam satu dekade terakhir. Mulanya di Timur Tengah. Di sana, populisme digunakan untuk menumbangkan rezim-rezim yang sedang berkuasa. Massa yang terkumpul lewat konsolidasi “darat dan juga “udara”, yaitu lewat demagogi rasis dalam kampanye terbuka di ruang-ruang fisik, juga lewat media sosial terutama facebook dan twitter, digerakan untuk menekan rezim-rezim yang dianggap otoriter atau yang sudah terlalu lama berkuasa. Trend ini bangkit karena ada semacam ilusi di kepala banyak orang bahwa sebuah sistem (entah demokrasi, sosialis atau komunis, monarki, otoriter) yang telah berlangsung lama, harus digantikan dengan sistem lain yang lebih baik, bersifat adil, dan mendatangkan kemakmuran. Ilusi ini dirasakan sangat banyak orang, persis seperti apa yang pernah terjadi di Eropa ratusan tahun silam ketika massa yang murka menyerbu penjara Bastille di Kota Paris dan terjadilah revolusi Prancis. Massa yang murka percaya pada ilusi tersebut bahwa

monarki misalnya harus diganti dengan sistem demokrasi. Atau demokrasi harus diganti dengan otoritarianisme. Dengan kata lain, sistem yang sedang dipraktekan negara, harus diganti. Jadi bisa saja dari monarki ke sistem sosialis, otoritarian ke sistem demokrasi, atau sebaliknya. Bahkan dari demokrasi ke sistem baru bernama khilafa.

Yang unik adalah gerakan massa tersebut tidak diimbangi dengan sikap kritis dan rasionalitas. Kerumunan yang turun ke jalan tidak paham bahwa mereka bisa saja hanya ditunggangi untuk sebuah kepentingan ekonomi-politik oligarki politik tertentu. Bahwa aksi protes mereka bisa saja dimanfaatkan oleh para peternak massa yang punya agenda merebut kekuasaan untuk tujuan politik dan ekonomi. Secara internasional untuk beberapa dekade terakhir, contoh gerakan massa yang paling disorot adalah fenomena *Arab Spring* (Musim Semi Arab).

Dalam fenomena *Arab Spring* ini, beberapa rezim mapan di Timur Tengah tumbang dan berguguran akibat aksi massa. Gerakan besar ini bermula ketika media sosial mulai digunakan untuk menyuarakan isu-isu ketidakadilan yang akhirnya memicu protes dan kerusuhan sosial di berbagai negara di Timur Tengah. Anehnya, dampak dari fenomena *Arab Spring* ini, menurut beberapa pengamat internasional, justru menjadi jalan menuju lahirnya rezim kediktatoran baru. Contohnya Mesir yang awalnya mengalami perubahan sosial yang signifikan, kini kembali suram oleh kekuasaan militer. Berikutnya adalah Tunisia, sebuah negara yang menjadi tempat awal dimulainya *Arab Spring*. Setelah tumbang rezim Ben Ali, krisis politik belum juga berakhir. Yang juga menarik adalah kondisi negara Suriah. Negara kaya minyak ini juga terus membara dalam konflik hingga hari ini. Perjuangan revolusi rakyat belum juga usai. Bashar Assad, masih duduk di kursi presiden. Hingga munculnya ISIS di sana. Kemudian yang paling baru yang juga menjadi

keprihatinan internasional adalah konflik di negara Yaman. Negeri yang baru saja dilanda perang sehingga terjadi intervensi militer oleh tentara koalisi Arab Saudi dan perang masih terjadi di sana hingga kini.

Tentang negara dan evolusinya, filosof Jean Paul Sartre ratusan tahun silam sudah mengatakan, sebuah sistem politik (negara) yang ditakdirkan untuk runtuh, merangsang banyak orang untuk mempercepat keruntuhannya (Hardiman, 2010). Indonesia sedang berada di batasan ini. Bahwa dengan akar ontologis dari tesis bahwa kemajemukan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada bangsa ini adalah sebuah keniscayaan membuat praktek politik Indonesia juga harus selalu multikultural. Tetapi apakah ini masih kuat dan terus bertahan? Jawaban sementara dan normatifnya adalah, sebagai bangsa dengan tingkat pluralitas SARA (baca: suku, agama, ras, dan antargolongan) terbesar di dunia, Indonesia memang akan senantiasa berada dalam ancaman konflik yang bisa berujung perpecahan dan disintegrasi. Konflik di republik ini umumnya dilatari oleh perbedaan pendapat, keinginan, paham/nilai, keyakinan, ideologi, dan tentu saja kebutuhan yang berbeda-beda. Dan itu wajar adanya. Selain itu, secara politik, untuk sedikit bernostalgia ke masa lalu, rivalitas politik adalah sesuatu yang sudah dianggap normal dan wajar di Indonesia sejak Pemilu tahun 1955. Sejak saat itu, setiap lima tahun sekali sudah pasti akan ada konstetasi politik. Juga selama 32 tahun demokrasi otoriter di mana selalu ada pemilu. Bahkan sejak adanya pemilihan langsung dan Pilpres di era demokrasi langsung, gejala dan konflik pra dan pasca Pilpres juga hampir tidak ada yang berujung rusuh dan mengancam integrasi bangsa.

Tetapi mengapa sejak Pilpres 2014, mulai terkuak secara empirik semacam fakta sosial baru bahwa bangsa ini belum benar-benar menyatu sebagai bangsa? Keterbelahan sebagai imbas kontestasi Pilpres saat Prabowo vs Jokowi jilid I, bahkan masih terus menjadi dendam yang kemudian memicu keterbelahan bangsa dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, di mana aksi massa sudah dimulai sejak 2016, dan berujung hingga Pilpres 2019. Kebangkitan sentimen primordial, kebencian antarpemeluk agama dan rivalitas yang tidak sehat antarpengikut tokoh politik seperti Jokowi dan Prabowo akhirnya terbukti membuat bangsa ini terbelah dan nyaris bubar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kajian ini akan coba mendiskusikan beberapa hal berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu tentang resesi demokrasi, akar keterbelahan bangsa, dan kehadiran sentimentalitas dalam politik Indonesia yang berujung pada ancaman disintegrasi bangsa.

Dengan kenyataan bahwa sentimentalitas ternyata bisa menjadi duri dalam demokrasi di mana siapa pun paham bahwa, dalam situasi sentimental, kepala biasanya tidak bekerja. Atau dalam bahasa Plato, “ketika kepala dikooptasi oleh selangkangan,” maka yang muncul di sana adalah kebencian dan amarah. Atau dengan kata lain, emosi dan berbagai bentuk prasangka akan menyeruak dan memenuhi ruang-ruang publik.

Sehingga kajian ini ditujukan untuk mengecek, apakah peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi di negeri ini yang melibatkan massa dalam jumlah besar, adalah murni sebagai alat perjuangan rakyat yaitu “alat perlawanan terhadap orang besar? Ataukah hanya “salinan kabur orang besar?” (ada *Man Behind The Gun?*) Dan atau itu hanyalah alat politik orang-orang besar?” Dengan pendasaran bahwa demokrasi seharusnya mampu mengatasi sentimentalitas, di mana tujuan demorkasi adalah rasionalisasi kekuasaan; Yaitu kekuasaan dikontrol oleh publik melalui debat terbuka di ruang-ruang publik secara diskursif dan argumentatif, maka seharusnya juga sentimentalitas juga bisa diatasi lewat diskursus dan komunikasi yang deliberatif.

2. Kerangka Teori

Proses mengidentifikasi pokok persoalan kajian selanjutnya akan ditelaah secara tersistematis dan mendalam dengan menggunakan pisau analisis dalam bentuk ragam perspektif. Kajian ini menggunakan konsep pemikiran para intelektual sosial yang berkaitan dengan tema obyek persoalan yang diangkat, yaitu:

2.1. Massa

Posisi gambar dan tabel berada pada awal atau akhir kolom. Hindari penempatan pada tengah kolom. Gambar besar dan tabel dapat diperlebar memenuhi kedua kolom.

Sebagaimana sebuah terminologi pada umumnya, massa juga punya banyak makna. Tapi dalam kajian ini massa lebih dimaksudkan sebagai kumpulan orang-orang dalam sebuah momentum tertentu. Budi Hardiman menulis dalam Anatomi Kekerasan Massa, bahwa “massa” adalah sebuah terminus yang sering dipergunakan dalam banyak arti dan sering tidak tepat pemakaiannya karena mengacu pada berbagai fenomena. Menurutnya, akibat salah pemakaian, istilah tersebut kemudian menjadi kabur. Secara umum, massa memiliki arti elementer: sesuatu yang terkait dengan kuantitas, mengacu pada jumlah yang sangat besar. Misalnya “kerumunan massa” saat penyambutan seorang tokoh. Atau dalam situasi lain ketika massa memadati sebuah kampanye akbar. Tetapi untuk situasi khusus, massa adalah

kumpulan manusia yang melampaui batas-batas institusional.

Dalam cara pandang negativitas, massa dalam konteks ini berkaitan dengan orang-orang yang berkumpul untuk melakukan sebuah tindakan yang berada di luar kontrol hukum dan norma sosial. Sekumpulan manusia menjadi massa dalam arti ini, jika mereka bertindak dengan mengabaikan norma-norma sosial yang berlaku dalam situasi sehari-hari. Massa dalam arti ini selalu berkaitan dengan situasi khusus, dengan keadaan sosial yang abnormal. Gustave Le Bon, bapak psikologi massa menulis bahwa massa itu bodoh, bersikap seperti perempuan, mudah diprovokasi, bersikap rasistis atau singkatnya irrasional. Massa, tulisnya lagi, senantiasa terkungkung dalam batas-batas ketidaksadaran, tunduk pada segala pengaruh, mudah diombang-ambingkan oleh emosi dan mudah percaya. Bahkan Sigmund Freud menjelaskan, situasi massa adalah "regresi ke aktivitas psikis yang primitif, ...bangkitnya kembali gerombolan purba dalam diri kita" (Hardimna, 2010). Dalam hal ini, kekuatan massa terletak pada kemampuan mereka untuk mengeroyok.

2.2. *Rasio Instrumental*

Pustaka rujukan dalam makalah ditulis dengan mencantumkan nama penulis, tahun, dan halaman yang dirujuk. Jika terdapat 3 (tiga) atau lebih penulis, gunakan "Penulis pertama, et al.". Contoh dan cara penulisan penulisan: "..... seperti pada Hammer (2002), Evans dan Lindsay (2005), Linderman et al. (2003, 2006)". "....dalam tahun terakhir (Johnson, 2005; Douglas and Erwin, 2000; Raisinghani et al, 2005) ". Rujukan pada awal kalimat : "Evans dan Lindsay (2005)"

Defenisi rasio instrumental lebih banyak merujuk pada istilah yang dipakai di dalam tradisi pencerahan yaitu filsafat aliran kritis mazhab Frankfurt Jerman. Meminjam cara berpikir para pemikir kritis yang mengadopsi terminologi sosiolog Max Weber, bahwa rasionalitas yang lebih banyak digunakan masyarakat moderen sejak revolusi industri adalah rasionalitas intrumental. Menurut Sindhunata dalam bukunya Dilema Usaha Manusia Rasional, rasio instrumental adalah rasio yang mengutamakan asas efektifitas dan efisiensi semata. Dan itu tercermin dalam watak manusia moderen yang cenderung menggunakan semua cara untuk menguasai alam. Akibatnya adalah rasio instrumental itu menjadi semacam ideologi yang diyanini. Segala sesuatu harus berorientasi pada manfaat dan hasil yang besar. Sebuah ideologi yang dipegang oleh para kapitalis.

Sindhunata lalu mengkritik mentalitas ini. Bahwa, mesin besar bernama kapitalisme telah meracuni dan menjadikan rasio manusia sebagai instrumental. Akibatnya adalah, masyarakat pun tidak memiliki kekuasaan untuk melawan pendindasan ini, mau tidak mau mereka harus memilih sistem yang sudah diberlakukan oleh sistem kapitalisme moderen (Sindhunata, 1982).

Meminjam Pierre Bourdieu, manusia moderen telah mempraktekan rasio instrumental sebagai semacam *Habitus*. Karena bisa dicek bahwa sejak adanya penemuan teknologi, manusia dikondisikan terus menaklukkan alam. Dalam hal ini yang diperhitungkan adalah pencapaian hasil atau tujuan sehingga cara apa pun dihalalkan. Ketika alam dirusak dan dieksploitasi secara kejam demi proyek besar bernama modernitas dan raksasa kapitalisme, manusia lalu menjadi korban. Mulai dari perubahan iklim secara ekstrem hingga pemanasan global. Itulah yang oleh Sindhunata dinamakan sebagai irasionalitas. Bahwa, usaha manusai rasional dengan proyek besar yang disebut rasionalitas justru menjadi sebuah irasionalitas.

Filsuf pencerahan Max Horkheimer (Purwanto, 1992) secara sangat sinis memadamkan rasionalitas manusia moderen seperti sebuah kebiasaan atau habitus. Yaitu sebuah kebiasaan yang tidak pernah dikritik sehingga sudah menjadi sebuah budaya. Bagi dia, rasionalitas manusia moderen itu dapat dianalogikan sebagai matahari yang terbit di dini hari, bersinar ditengah hari dan terbenam di senja hari. Horkheimer menuduh rasio manusia telah berubah menjadi bersifat instrumentalis semata, yang netral dan tumpul sehingga kehilangan daya kritisnya. Akibatnya adalah, manusia moderen lalu terjerumus ke dalam keirasionalan yang membelenggunya. Manusia moderen hanya mementingkan kalkulasi efektif dan efisien tanpa memperhatikan nilai dan humanisme dalam penerapan rasionalitas.

Bagi Horkheimer, Rasionalitas manusia mengalami kemunduran yang ditandai oleh hilangnya daya kritis rasio manusia. Manusia telah pasrah dan tunduk terhadap hal yang berada di luar dirinya, yaitu pengendalian oleh hasil ciptaan rasionya sendiri yaitu modernistas dan segala gemilang pencapaiannya, termasuk teknologi dan sistem informasi. Manusia tidak lagi memeriksa semua kemajuan itu dengan rasionya sendiri. Sebuah pembuktian dari Max Horkheimer bahwa rasio telah menjadi murni instrumental dan tidak lagi mempunyai daya kritis.

Dalam kaitan dengan situasi masyarakat moderen, ketika segala sesuatu hanya digunakan sebagai sarana atau alat untuk meraih tujuan tanpa memperhitungkan nilai dan value dari cara maupun tujuan yang mau dicapai di sana, maka watak ini disebut juga sebagai watak instrumental.

Dalam dunia politik pun sama. Ketika segala sesuatu hanya dimanfaatkan sebagai alat semata untuk meraih kekuasaan maka yang terjadi di sana adalah instrumentalisasi. Sama halnya dengan situasi ketika agama hanya digunakan sebagai alat politik, maka yang terjadi di sana adalah instrumentalisasi agama. Demikian juga ketika sentimentalitas entah berkaitan dengan kebencian pada suku, agama ataupun lawan politik yang berbeda latar belakang budaya dan agama digunakan untuk membangkitkan kemarahan massa, maka yang terjadi adalah instrumentalisasi sentimentalitas. Artinya, meskipun itu rasional karena dilakukan dengan pertimbangan yang matang demi tujuan perebutan kekuasaan, tetapi sesungguhnya irasional karena melawan norma-norma berdemokrasi, memanipulasi sebuah keyakinan yang kudus untuk urusan perebutan kekuasaan serta menghinai nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

2.3. *Sentimentalitas*

Carl Gustav Jung menyebut sentimentalitas adalah bangunan atas yang menutupi brutalitas. Meskipun bisa juga digunakan dalam makna yang baik, sentimentalitas dalam politik dan problem demokrasi digunakan dalam arti yang peyoratif sebagai “rasa persekutuan” yang mengancam fairness dalam prosedur demokratis. Identitas-identitas kolektif, bukan hanya agama, melainkan juga suku, ras, golongan, ataupun kategori-kategori kolektif lainnya dapat menjadi sumber rasa persekutuan itu yang mencederai netralitas prosedur demokrasi, terutama ketika “rasa persekutuan” itu digunakan untuk melayani kepentingan-kepentingan pencarian kekuasaan (Hardiman, 2018). Jelas di sini bahwa, sentimentalitas adalah sebuah korupsi berbahaya yang dapat mengarah pada brutalitas. Dan dalam situasi tertentu ketika manusia kehilangan jati dirinya, manusia bisa menjadi brutal karena ia membutuhkan semacam penegasan akan dirinya lewat kerumunan dan kekerasan. Tesis yang cukup ganjil bahkan dikemukakan oleh Hannah Arendt bahwa daya dan kekuatan manusia secara mendasar tampak dalam pengalaman kekerasan. Dari daya kekuatan itulah berasal rasa kepastian diri dan identitas (Hardiman, 2011).

Plato bahkan sudah memperingatkan sejak lama bahwa, persandingan demokrasi kerumunan dan sentimentalitas akan membuahkan ketidakadilan karena kerumunan itu sentimental dan rentan untuk dimanipulasi. Di zaman Plato, kerumunan anak-anak muda yang sentimental di parlemen, teater hingga medan perang dibakar oleh demagogi kaum sofis dan para politisi untuk tujuan politik sehingga pendidikan seolah tidak berdaya menahan provokasi tersebut. Sentimentalitas mengendap dalam berbagai

wujud yaitu lewat prasangka-prasangka, stigmatisasi, diskriminasi, pengadilan massa, primordialisme, ujaran kebencian, dll. Sehingga Gergoe Simmel menulis, “pada aksi massa, motif-motif dari para individu seringkali sedemikian berlainan, sehingga penyatuan mereka semakin mungkin, jika isi dari aksi massa itu semakin negatif, yakni semakin destruktif.” (Hardiman, 2011).

Karena politik massa adalah politik representasi maka yang direpresentasikan sebagai musuh adalah, baik musuh agama, musuh suku, maupun musuh kelompok, prinsipnya adalah yang direpresentasikan itu adalah pihak yang harus dilawan. Kini dengan bantuan media massa plus media sosial yang telah berubah fungsi dari alat berkomunikasi dan pencerahan menjadi generator dan otak pembangkit amarah massa, aksi massa menjadi semakin mengerikan. Secara global dan juga Indonesia hari-hari ini, bisa ditemukan fakta bahwa, mereka yang direpresentasikan sebagai lawan oleh aksi massa bisa berasal dari suku, ideologi dan ras tertentu, dan yang lebih mengerikan adalah ketika lawan adalah orang atau kelompok yang berasal dari agama berbeda. Meskipun agama dan kebudayaan mampu mempekokoh kesadaran individu, tetapi dalam keadaan ketidaksamaan struktural, individu-individu yang merasa tidak berdaya dan mengikuti mekanisme survival mereka, akan cenderung lari kepada solidaritas berbasiskan agama dan budaya. Karena yang mereka rasakan adalah mereka juga merasa mendapatkan perlindungan dari nilai-nilai religio-cultural yang menopang kolektivitas.

Tentang sentimentalitas, dahulu kala orang harus dikumpulkan dengan menggunakan cara-cara demagogi rasis dalam sidang rakyat dan sejenisnya. Tapi dekade ini, semuanya sudah sangat mudah. Cukup dengan menekan jari pada tombol gawai. Lalu pesan rasis dan provokatif dikirim ke lini massa media sosial dengan akun-akun palsu dalam jumlah gigantis, pada saat itu juga kebencian terbentuk, solidaritas bangkit dan orang digerakan tanpa harus menunggu waktu yang lama untuk menjadi massa yang murka. Dalam kasus Indonesia dan beberapa negara di dunia, instrumentalisasi sentimentalitas terutama dengan berbasis pada agama berhasil menggerakkan aksi massa yang luar biasa. Dalam hal ini ketika agama sudah digunakan untuk motif-motif politik maka agama sudah dibajak untuk urusan kekuasaan. Inilah sisi kelam dari agama yaitu ketika agama direndahkan hanya sebagai alat kekuasaan. Meskipun secara teologis semua agama adalah institusi kudus dan berahmat tapi dalam dimensinya sebagai institusi sosial, agama rentan digunakan oleh

sebagian besar orang yang memiliki kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi untuk melakukan aksi-aksi perlawanan, gerakan intoleransi, yang kebanyakan berujung pada brutalitas.

2.4. Integrasi dan Disintegrasi

Secara etimologis, Integrasi berasal dari bahasa Inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi nasional merujuk kepada seluruh unsur yang bersatu dalam rangka melaksanakan kehidupan bangsa dan negara, meliputi sosial, budaya ekonomi. Sehingga integrasi nasional lebih menekankan persatuan persepsi dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Disintegrasi terjadi ketika adanya perpecahan atau hilangnya persatuan suatu bangsa. Ada banyak penyebab disintegrasi bangsa, mulai dari rasa tidak puas atas ketidakadilan hingga pemborantakan dan separatisme. Walaupun begitu, banyak faktor lain yang menyebabkan disintegrasi suatu bangsa seperti timbulnya perpecahan antar suku dan agama, konflik berkepanjangan, ketidakpercayaan, perang saudara, dan lain-lain. Jean Jacques Rousseau dalam bukunya *Du Contract Social ou Principes du droit politique*, melihat bahwa hubungan individu dan negara harus didasarkan pada kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama (Hardiman, 2004). Adanya *volunte generale* (kehendak umum) yang merupakan cikal bakal masyarakat sipil. Integrasi dimulai dari kontrak sosial dan kesepakatan bersama, sedangkan disintegrasi dapat terjadi ketika kontrak sosial dan kesepakatan bersama mulai dilanggar. Kontrak sosial bersifat terbuka dan relatif, hal ini akan kehilangan legitimasi, ketika sadar atau tidak, rela atau terpaksa, kesepakatan bersama sudah tidak lagi diindahkan.

2.5. Konflik

Istilah "konflik" secara etimologis berasal dari bahasa Latin "*con*" yang berarti bersama dan "*fligere*" yang berarti benturan atau tabrakan (Setiadi&Kolip, 2011). Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Dalam konflik berlangsung benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas. Konflik merupakan fenomena yang sudah lazim terjadi dalam manusia, baik dalam skala kecil seperti konflik individual seperti

antar teman maupun skala besar seperti konflik antar negara.

Konflik sendiri melibatkan hubungan antara dua atau lebih pihak (individual atau kelompok) yang berasumsi bahwa mereka memiliki tujuan yang tidak sama atau bertentangan (Mitchell, 1981). Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasakan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya. Berdasarkan posisi pelakunya, konflik dapat dibagi dalam 3 tipe, yaitu konflik vertikal, horizontal, dan diagonal. Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai *status quo* dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai *status need*.

Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu: kemajemukan vertikal dan kemajemukan horizontal. Wujud konflik paling akut dalam bentuk kekerasan fisik oleh massa. F Budi Hardiman dalam tesisnya mengkonsepkan 3 bentuk akar kekerasan massa (Hardiman, 2004), yaitu : 1) Akar Epistemologis, yang memaksudkan proses pengenalan manusia terhadap manusia lainnya. Orang lain dipandang sebagai kawan atau lawan. Dalam kondisi massa, para pelaku kekerasan tidak merasa membunuh 'massa', mereka justru melihat korbannya sebagai lawan yang layak untuk disingkirkan / dibasmi. Kekerasan yang mereka lakukan seperti 'kewajiban etis' yang berguna menjaga keutuhan kolektif mereka, 2) Akar Antropologis, yang menggambarkan tindakan kekerasan massa tidak dilakukan secara spontan / naluri, melainkan di dasarkan pada nilai / makna tertentu yang ingin diekspresikan melalui tindakan kekerasan itu sendiri. Dalam sudut pandang ini, orang melakukan kekerasan karena kehilangan pegangan sosial dan mengalami ketidakpastian, maka akhirnya fanatisme, radikalisme, dan kekerasan menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh kepastian.

Kekerasan juga datang dari rasa kecemasan dan kegelisahan individu karena termaginalkan dalam kehidupan sosial. Rasa panik mudah memantik tindakan kekerasan untuk agar tetap bertahan dalam kehidupan sosial, 3) Akar Sosiologis, yang menunjukkan bahwa menggabungkan diri ke dalam kumpulan massa dan melakukan tindakan destruktif merupakan bentuk penegasan ego diri yang panik melalui penegasan kelompok. Dari ketidakberdayaan individu untuk bertindak sendiri, maka mereka harus meminjam wajah massa agar leluasa bertindak. Massa mengurangi rasa tanggungjawab personalnya.

2.6. Keadilan Pra Politis dan Keadilan Politis

Konflik, kekerasan, protes massa dan teror biasanya berkaitan dengan isu keadilan dan ketidakadilan. Konsep keadilan sudah sangat lama diperdebatkan dalam peradaban manusia. Sudah lebih dari dua milenium, keadilan menjadi masalah krusial dalam negara. Adil dan tidak adil adalah komoditas politik yang seksi dalam politik. Karena isu inilah, banyak negara sering mengalami gejolak karena protes massa soal ketidakadilan. Menurut para pencetus teori kontrak sosial seperti Locke dan Rousseau, keadilan adalah defenisi yang harus dipahami dalam konteks politik. Sebab yang dibicarakan adalah bagaimana adil dalam setiap masyarakat negara di mana pluralitas pandangan hidup, nilai, latar cultral, pandangan religius, dan latar belakang sosial yang berbeda adalah sebuah keniscayaan.

Sehingga berbicara tentang keadilan dalam negara moderen selalu berkaitan dengan realita masyarakat yang majemuk dan multikultural. Karena itu keadilan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Dengan pertimbangan bahwa masyarakat terdiri dari beragam kelompok dengan orientasi nilai etnis, religius, kultural yang berbeda-beda dan bahkan bisa saling berseberangan, sementara negara adalah hasil kontrak para anggota untuk hidup bersama secara politis dalam sebuah tatanan hukum dan organisasi politis yang diterima oleh semua pihak (Hardiman, 2004). Maka pemahaman tentang keadilan dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia harus berbasiskan pada asumsi dasar teori kontrak. Bahwa keadilan itu ada yang pra politis yaitu yang berkaitan dengan adil dan tidak adil menurut setiap pandangan hidup, agama, budaya dan kelompok partukular tertentu. Sedangkan keadilan politis adalah keadilan yang berkaitan dengan adil menurut kesepakatan-kesepakatan bersama dalam negara yang kemudian menjadi hukum dan undang-undang. Di mana, hukum dan undang-undang ini diterima secara nalar oleh seluruh warga negara sebagai panglima.

Sebagai pembimbing tindakan sosial dan penyelesai konflik. Ketaatan warga negara mengikuti prosedur hukum dan demokrasi dalam negara demokrasi moderen adalah penjamin tegak-tidaknya negara tersebut. NKRI juga demikian. NKRI dijamin oleh ketaatan warga negara pada prosedur hukum dan demokrasi.

2.7. Demokrasi

Demokrasi merupakan paham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin '*power of the people*', yaitu kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai paham, ideologi, dan sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik dari sistem politik lainnya yang ada tiap negara. Mengapa? Menurut para ahli politik, demokrasi adalah sistem yang mampu memperbaiki kelemahannya sendiri secara terus-menerus menuju model yang terbaik untuk setiap bangsa. Paham ini sangat luas diterima di banyak negara di dunia. Saking kuatnya paham demokrasi, sampai-sampai konsepnya menjadi sebuah keyakinan politik di banyak negara. Bahkan berkembang menjadi mitos yang dipandang membawa berkah bagi kehidupan bangsa-bangsa beradab (Huntington, 1995).

Sedangkan pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demoscratos* (demokrasi) adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Azra, 2000). Dalam hal ini, demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang (Taupan, 1989). Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia mempunyai kebebasan dan kewajiban yang sama.

Filosof Jurgen Habermas dalam teorinya tentang demokrasi deliberatif meradikalkan konsep demokrasi menjadi pemerintahan oleh mereka yang diperintah. Di mana konsepnya ini dijelaskan dengan sangat baik oleh Rainer Forst. Bahwa, demokrasi deliberatif berarti, bukanlah jumlah kehendak-kehendak individual dan juga bukan sebuah "kehendak umum" yang merupakan sumber legitimasi, melainkan sumber legitimasi itu adalah proses formasi deliberatif,

argumentatif-diskursif suatu keputusan politis yang ditimbang bersama-sama yang senantiasa bersifat sementara dan terbuka atas revisi (Hardiman, 2009).

3. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan kombinasi metode telaah kasus. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif (Moleong, 2007). Teknik pengumpulan data terutama dalam bentuk data sekunder berupa dokumen.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kebangkitan Politik Populisme dan Teror Massa: Studi kasus Indonesia

Apa yang di Timur Tengah disebut sebagai fenomena *Arab Spring* yang dipicu oleh ilusi mengganti sistem pemerintahan, atau yang berlangsung di beberapa negara baik di Eropa maupun Amerika, sebagai politik populisme, juga sedang mendapat momentum kebangkitannya di Indonesia. Sejak Pilgub DKI Jakarta 2017, bisa dikatakan bahwa politik populisme menjadi fenomena baru dalam politik praktis di Indonesia. Jika di AS, ada agitasi rasis sistematis lewat kampanye terbuka dan operasi senyap di media sosial yang sukses membangkitkan solidaritas ras kulit putih Amerika untuk memenangkan Trump, atau di Inggris muncul agitasi yang sukses membangkitkan kemarahan warga Inggris yang berujung Brexit, maka di Indonesia, agitasi rasis dan provokasi masif dengan menggunakan isu agama, baik dalam kampanye-kampanye terbuka juga gerakan massa di media sosial, sukses membelah bangsa Indonesia menjadi kawan versus lawan. Secara empirik, apa yang terjadi di Indonesia bisa disebut sebagai politik populisme kanan, yaitu kebangkitan gerakan massa karena dipicu sentimen agama.

Secara kronologis, politik populisme di Indonesia mulai mendapat momentumnya sejak Pilpres 2014. Keterbelahan masyarakat dalam Pilpres 2014 mulai merembet ke dalam pertarungan politik di berbagai level, mulai dari pemilihan Bupati hingga Gubernur. Gesekan sosial yang kian keras ini akhirnya memuncak menjadi sangat panas menjelang Pilgub DKI Jakarta. Saat itu, diawali oleh aksi massa yang disebut Aksi Bela Islam I. Aksi di bulan Oktober 2016 ini mulai menarik perhatian masyarakat dan media, sehingga menjadi semakin besar dalam Aksi Bela Islam II yang terkenal dengan aksi 411/2016, lalu disusul dengan aksi akbar 2 Desember 2016 atau 212, yang menjadi salah satu aksi yang paling

dikenal. Lalu setelah itu ada aksi-aksi bela Islam hingga 7 jilid aksi dan berujung pada dipenjarakannya Ahok. Sejak saat itu, aksi-aksi ini menjadi awal kebangkitan metode politik populisme di Indonesia, setelah sekian lama tiarap. Meskipun sering kali ada aksi massa buruh, tetapi nyaris tidak pernah ada aksi massa besar setelah gerakan Mei 98' yang dikenal karena sukses menurunkan Soeharto. Dampak berita soal aksi-aksi ini memang luar biasa. Masyarakat Indonesia mulai diframing untuk menerima politik populisme ini sebagai jalan baru dalam berpolitik meskipun menerjang prosedur demokrasi dan hukum. Bisa dikatakan dalam Aksi Bela Islam dan banyak aksi sesudahnya memancing hampir semua oposisi pemerintah, baik yang kritis maupun yang memang membenci pemerintah, bangkit dan menggunakan momentum tersebut untuk menyampaikan unek-unek mereka.

Dalam catatan media, hingga dipenjarakannya Ahok, ada sekitar 7 jilid Aksi Bela Islam. Peristiwa berjilid-jilid ini adalah contoh nyata betapa politik populisme terutama populisme kanan sedang mendapat momentum kebangkitan di Indonesia. Peristiwa itu harus diakui punya dampak psikologis yang sangat kuat bagi rakyat. Akibat konstruksi media dan masifnya lalu lintas komunikasi di media sosial, peristiwa ini lalu menjadi begitu heboh. 212 mungkin akan selalu dikenang sebagai bagian krusial dalam sejarah perjalanan bangsa. Padahal aksi ini awalnya hanya sebuah protes kecil soal pernyataan Ahok di Pulau Seribu dalam sebuah potongan video yang juga sudah diedit. Tetapi protes kecil itu kemudian dikonsolidasi menjadi aksi akbar karena digerakan oleh isu-isu hoax dan narasi-narasi kebencian yang disebar lewat media sosial juga lewat kotbah-kotbah di rumah-rumah ibadah.

Gerakan massa dalam peristiwa 4/11 dan aksi akbar 212 tercatat sebagai peristiwa penting yang menentukan kekalahan Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta, juga menentukan vonis hakim dua tahun penjara untuk Ahok. Sebab sidang berlangsung dalam situasi menegangkan penuh tekanan massa yang murka. Setelah Ahok dipenjara gerakan serupa masih saja digunakan hingga puluhan kali aksi selama kurun waktu 2016 hingga Mei 2019 silam. Sebelum Pilpres 2019 misalnya, aksi yang paling diingat adalah aksi massa dalam reuni akbar 212. Juga aksi massa di depan gedung MK, yang berpuncak pada aksi massa tanggal 22-23 Mei 2019 silam yang berujung chaos dan rusuh besar di seantero Jakarta. Inilah potret politik populisme di Indonesia dalam lima tahun terakhir yang melibatkan massa dalam jumlah besar.

Secara sosiologis, peristiwa-peristiwa tersebut memang pantas disebut "peristiwa besar". Karena dalam dua dekade terakhir, belum pernah ada lagi demonstrasi dengan jumlah massa yang gigantis

seperti Mei 1998. Meskipun terminus “besar-kecil” masih bisa diperdebatkan terutama secara genealogis karena tidak ada substansi yang benar-benar real dan stabil; Juga karena terminus ini hanyalah sebuah konstruksi sosial, tetapi sekiranya banyak orang setuju bahwa selain karena menghadirkan jumlah massa jutaan orang juga karena konstruksi kekuatan teknosains media masa. _Terutama oleh pengambilan gambar lewat pemanfaatan *Drone* atau pesawat nirawak yang membuat framing media menjadi semakin luar biasa dan memukau karena seolah-olah diambil oleh “mata Allah” dari langit. Juga tentu karena amplifikasi yang luar biasa di media sosial. Sehingga peristiwa-peristiwa itu sudah layak disebut peristiwa luar biasa.

Dalam beberapa peristiwa besar itu, juga terlihat bahwa aksi massa yang dibalut tagline religius, kemudian dibelokan untuk kepentingan politik. Baik di Pilgub DKI Jakarta maupun dalam Pilkada serentak 2018 hingga Pilpres 2019. Di ujung beberapa aksi yang disebut damai itu, muncul beberapa keributan juga rusuh besar yang membuat peristiwa-peristiwa itu kemudian diasosiasikan secara negatif. Misalnya aksi massa yang disebut aksi damai di depan gedung Bawaslu RI, justru menjadi rusuh pada tanggal 22-23 Mei 2019. Selain aksi bakar mobil aparat, pelemparan dan penyerangan terhadap aparat, pemukulan, penjarahan di banyak lokasi oleh massa yang tidak terkendali. Juga beberapa rencana subversi yang diungkap aparat intelijen dan polisi. Semuanya adalah bukti empirik lainnya bahwa peristiwa-peristiwa besar itu lebih condong disebut sebagai gerakan politik populisme atau populisme kanan untuk kepentingan politik dan bukan murni untuk urusan keadilan.

Uniknya adalah, selain masifnya penggunaan kekuatan aksi massa dalam jumlah besar untuk menekan pemerintah, aksi mirip pun dilakukan di dunia maya. Aksi massa yang terjadi di dunia nyata seperti aksi 411 atau 212, tidak lebih menghebohkan dari aksi massa maya di dunia maya. Produksi hoax dan narasi-narasi kebencian juga dilakukan secara terstruktur untuk menciptakan keterbelahan bangsa. Beberapa kelompok pencipta hoax dan narasi kebencian berhasil diamankan pihak keamanan. Kelompok yang paling besar adalah *Saracen* dan *Muslim Cyber Army*. Kelompok *Saracen* misalnya, terungkap menggunakan lebih dari 2000 akun media sosial untuk menyebarkan konten kebencian. Rilis resmi dari kepolisian mencatat, jaringan yang tergabung dalam kelompok *Saracen* menggunakan lebih dari 800 ribu akun untuk berselancar di media sosial dan menyebar kebencian secara masif dari jam ke jam. Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta lain bahwa ternyata kelompok ini melakukan aksi mereka semata-mata demi uang. Artinya, alasan ekonomi menjadi dasar mengapa mereka tega

melakukan aksi tersebut. Menurut polisi, kelompok ini menhaku mereka selalu siap mem-post berita atau konten kebencian jika mereka dibayar. Tarif dan proposal yang mereka ajukan ke berbagai pihak menyebutkan angka 72 juta untuk setiap paket pekerjaan menyebarkan hoax dan kebencian di media sosial.

Akibatnya, kerumunan yang murka di media sosial, terkadang lebih menakutkan daripada aksi massa di jalanan ibu kota Jakarta. Kebencian di media sosial memang lebih sulit untuk dihentikan ketika sudah diposting. Buah dari provokasi dan hasutan di media sosial adalah terjadinya keterbelahan bangsa dalam Pilkada DKI dan Pilpres 2019. Bagaimana dasyatnya narasi kebencian antar anak bangsa yang berhamburan di media sosial sejak Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019 bisa dilukiskan sebagai sesuatu yang sudah di luar batas. Keterbelahan bangsa yang sebenarnya sudah terjadi sejak Pilpres 2014 lalu mendapat amplifikasinya secara sangat mengerikan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017-2018, dan berpuncak dalam Pilpres 2019. Itulah mengapa banyak pihak membuat prediksi bahwa bangsa Indonesia bisa bubar jika narasi-narasi kebencian dan hoax di media sosial tidak bisa dihentikan.

Jika di zaman dahulu, konflik sosial di suatu daerah tidak akan merembet menjadi masalah nasional karena tidak ada media sosial. Maka di era digital ini, semuanya menjadi sangat rumit. Sebab, rivalitas dalam politik praktis di DKI Jakarta misalnya, langsung dibelokkan menjadi masalah antarkelompok termasuk antarpemeluk agama. Padahal urusan politik seharusnya tidak dikait-kaitkan dengan harmoni antaragama. Akibatnya, apa yang belum pernah terjadi sejak Indonesia merdeka justru terjadi di era media sosial. Perang hinaan dan kebencian secara sangat ekstrem antara kelompok cebong vs kampret. Juga antara yang menyebut diri religius vs kafir. Juga yang pancasilais vs yang dicap tidak pancasilais adalah menu bermedia sosial jutaan anak bangsa setiap hari.

Dampaknya adalah, di dunia nyata, kebencian dari media sosial itu lalu dimanifestasikan secara brutal dalam sikap hidup. Misalnya saja aksi mencekam sekelompok massa dalam kasus pemindahan kuburan orang yang berbeda pilihan politik. Atau aksi penolakan mensholatkan jenazah seorang nenek di DKI Jakarta akibat disebut mendukung Ahok. Juga aksi emak-emak yang mengancam warga dari rumah ke rumah untuk tidak memilih Jokowi. Atau apa yang dilakukan warga tertentu yang menolak kunjungan Prabowo atau Sandi di beberapa lokasi. Itulah contoh nyata betapa kebencian antaranak bangsa itu begitu mengerikan dan nyata. Mungkin hanya di Indonesia, keterlibatan dalam “perang saudara” ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang melek politik tapi juga

berhasil memprovokasi anak-anak hingga emak-emak yang biasanya jauh dari urusan politik praktis. Kaum yang seharusnya jauh dari hingar-bingar politik ini, dipaksa terlibat untuk memperagakan aksi kebencian yang sangat menakutkan.

Meskipun NKRI masih kokoh berdiri dan tidak runtuh, kondisi keterbelahan itu nyata dan telah berhasil mendestabilisasi integrasi nasional dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan puncaknya pada tanggal 22-23 Mei 2019 silam. Ketika itu integrasi nasional sempat berada di tubir jurang. Jika saja pihak keamanan tidak berhasil meredam rusuh di Jakarta dan beberapa rencana makar yang melibatkan pensiunan aparat keamanan, maka negara ini bisa saja sudah bubar. Pemerintah saat itu berhasil meredam amplifikasi berita bohong dan hoax di media sosial tentang rusuh dengan shutdown media sosial. Apabila kerusuhan saat itu berhasil menyebar ke seantero Indonesia, mungkin saja NKRI sudah bubar. Apalagi kondisi-kondisi sosial politik yang menjadi preseden keruntuhan itu sudah nampak. Selain aksi massa dalam jumlah ginatis, narasi-narasi kebencian yang disemburkan di media sosial sudah berhasil membelah bangsa dalam formasi kawan vs lawan.

Pengalaman kebangkitan populisme kanan di Indonesia menjadi sebuah realita tentang betapa dilematisnya menjadi sebuah negara moderen yang menerapkan sistem demokasi. Sebagai negara demokratis, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat dijamin oleh konstitusi sehingga siapa saja menjadi demikian bebasnya mengekspresikan pendapatnya. Situasi yang cenderung liberal ini, akhirnya mengancam keutuhan bangsa karena tanpa filter, segala bentuk komunikasi rasis, provokatif, anti minoritas, kebencian pada suatu kaum, atau fitnah dan caci maki, bebas diungkapkan dan mendominasi konten komunikasi di ruang publik.

4.2. *Terbantahnya Klaim Fukuyama tentang Kemenangan Demokrasi Liberal*

Realita keterbelahan warga negara dalam politik di Indonesia sejak Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019, meruntuhkan tesis yang dikemukakan Francis Fukuyama sekitar satu dasawarsa yang lalu tentang kemenangan demokrasi liberal. Keyakinan bahwa demokrasi liberal akan menjadi satu-satunya sistem politik yang tersisa di dunia, karena sistem ini akan menjadi satu-satunya sistem politik yang diikuti oleh seluruh negara ternyata keliru. Selain belum berhasil menundukan sisa-sisa sosialisme, maklumat kemenangan “demokrasi liberal” sudah berhadapan dengan situasi baru di banyak negara di dunia di mana prosedur-prosedur demokrasi tidak lagi diikuti. Justru yang terjadi adalah sebagaimana dikatakan Goenawan Mohamad, di mana-

mana orang mulai berbicara tentang “resesi demokrasi”. Atau yang diakui sendiri oleh Francis Fukuyama bahwa kini ia sendiri tidak punya teori bagaimana demokrasi bisa berjalan mundur.

Kemunduran demokrasi atau demokrasi justru berjalan ke belakang juga terjadi dalam kasus Indonesia. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, dengan mempraktekan demokrasi secara penuh, mulai dari adanya sistem kebebasan pers, pemilu langsung, kebebasan mengemukakan pendapat di ruang publik termasuk ruang publik virtual/maya lewat media sosial, juga adanya sistem hukum yang lebih baik, ternyata tidak banyak membantu kemajuan demokrasi. Dalam lima tahun terakhir, bisa disaksikan bagaimana rasionalitas raib dari ruang-ruang publik dan keterbelahan bangsa menjadi begitu mengerikan. Demokrasi di Indonesia akhirnya harus diakui sedang berjalan mundur. Sebuah fakta yang sudah terjadi sejak Pilpres 2014.

Sudah banyak studi politik dan sosial yang dilakukan untuk mengungkap akar persoalan kemunduran demokrasi di Indonesia. Tetapi yang tidak banyak dilakukan adalah menyerobot semua jawaban yang diajukan dan menemukan sesuatu yang tersamar tapi nyata, yaitu kehadiran sentimentalitas dalam demokrasi di Indonesia. Studi Budi Hardiman menemukan ini. Bahwa, sentimentalitas adalah akar yang memicu massa yang murka yang kemudian digerakan untuk mengancam aparat hukum, menekan pengadilan dan polisi, bahkan mendestabilisasi keutuhan negara.

Selain sentimentalitas, ada juga variabel penopang lainnya yaitu masalah ketidakadilan yang nyata dalam ekonomi. Tetapi mengatakan itu sebagai akar persoalan bangsa satu-satunya adalah gegabah. Karena menjawab setiap pertanyaan hanya dengan satu faktor sebagai penjelas adalah salah. Selain masalah ketimpangan di bidang ekonomi, masalah nalar juga menjadi sebuah persoalan pokok yang bisa memicu lahirnya sentimentalitas. Artinya, munculnya modernitas sejak revolusi industri, hingga kecanggihan dunia hari ini lewat gadget dan internet, gagal memajukan peradaban manusia secara substansial. Justru turut memicu kemunduran demokrasi termasuk yang dialami Indonesia.

Ini terjadi karena segala kecanggihan dalam modernitas itu tidak dibarengi oleh kematangan dalam cara berpikir dan kemampuan mempraktekan rasionalitas. Bahkan rasionalitas juga raib dalam segala jenjang pertarungan politik. Mulai dari kontestasi elektoral di level pemilihan Bupati dan Gubernur, hingga pemilihan presiden. Kasus Saracen dan Muslim Cyber Army yang ditangkap polisi karena menjadi penyebar hox dan narasi-narasi rasis sejak Pilkada DKI Jakarta hingga memasuki masa-masa awal kampanye Pilpres

2019, adalah contoh soal betapa rasionalitas dan hati nurani raib di hadapan kecanggihan gawai.

Politik Indonesia kemudian didominasi oleh kebencian, fitnah, demagogi rasis, provokasi kebencian dan amuk massa yang murka. Semuanya itu berakar pada satu hal, sentimentalitas. Dari sentimentalitas ini lahir rasa persekutuan yang dibelokan untuk kepentingan politik dengan cara menerjang prosedur-prosedur demokrasi dan hukum. Bisa dikatakan bahwa, di Indonesia dalam lima tahun terakhir, sentimentalitas telah menghasilkan rasa persekutuan yang berujung aksi massa yang menerjang prosedur demokrasi. Dan dalam beberapa kasus berujung pada brutalitas.

Hal inilah yang membuat system demokrasi dianggap gagal. Padahal menurut para ahli politik, demokrasi adalah sistem yang paling baik di antara semua system karena demokrasi mampu memperbaiki kelemahannya sendiri secara terus-menerus hingga mencapai model yang terbaik bagi setiap bangsa. Meski kedaulatan berada di tangan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, bukan berarti rakyat berkuasa di atas hukum dan pemerintahan. Prosedur demokrasi adalah melalui perwakilan dan representasi. Jadi mengikutsertakan rakyat secara aktif dalam pengambilan keputusan melalui debat-debat yang inklusif dan argumentatif di ruang-ruang publik akan membuat demokrasi menjadi system yang fleksibel dan cocok di setiap zaman. Untuk Indonesia, meminjam Jurgen Habermas, demokrasi deliberatif yaitu model radikal demokrasi perlu dipraktikkan. Yaitu, pemerintahan oleh mereka yang diperintah. Artinya, bukanlah jumlah kehendak-kehendak individual dan juga bukan sebuah "kehendak umum" dari sebuah kelompok atau massa yang menjadi sumber legitimasi, melainkan sumber legitimasi itu adalah proses formasi deliberatif, argumentatif-diskursif suatu keputusan politis yang ditimbang bersama-sama dan senantiasa bersifat sementara atau terbuka untuk direvisi.

Jadi yang terjadi dalam gerakan murka yang menerjang prosedur demokrasi dan hukum adalah praktek anti demokrasi. Karena tidak ada adu gagasan dan proses deliberasi argumentasi di sana. Justru yang dilakukan adalah pemaksaan kehendak secara absolut dan bahkan dengan ancaman kekerasan. Padahal demokrasi yang prosedural dan deliberatif adalah soal pencapaian konsensus melalui debat sehat dan deliberasi ide. Jadi demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga negara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu.

Sehingga setiap keputusan politik haruslah diuji secara publik sedemikian rupa sehingga alasan-alasan tersebut diterima secara intersubjektif oleh

semua warga negara dan siap dikritik juga direvisi. Bukan pemaksaan kehendak sebuah kelompok particular tertentu atau keadilan pra politis tertentu menjadi hukum Negara. Dalam hal ini, demokrasi dan NKRI sedang mendapat ancaman serius bukan dari invasi Negara lain, melainkan dari sikap-sikap hidup warga Negara Indonesia yang memanfaatkan kebebasan dalam Negara hukum demokratis ini untuk menerjang prosedur demokrasi itu sendiri.

4.3. Tubrukan antara Keadilan Pra Politis dan Keadilan Politis

Dalam kasus Indonesia terbaca bahwa ancaman paling serius dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia adalah belum selesainya hubungan antara negara dan agama. Meskipun para pendiri bangsa sudah menetapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara, hingga hari ini, belum ada titik temu yang cukup kuat untuk mengikat semua warga bangsa sebagai bagian utuh dari NKRI. Masih ada kelompok yang merasa bahwa hukum dan undang-undang bukanlah panglima dalam hidup bersama sebagai warga negara. Dalam pandangan mereka, prosedur hukum bukan jalan terbaik menyelesaikan masalah sebagai warga negara. Menerjang prosedur hukum, misalnya dengan gerakan massa dan gerakan murka adalah jalan terbaik untuk menekan aparat hukum. Di bidang politik, pemilu bukanlah solusi, menyalurkan aspirasi melalui semua saluran komunikasi politik juga lewat institusi legislatif bukanlah pilihan. Menerjang prosedur-prosedur demokrasi lewat tindakan-tindakan yang mengandalkan jumlah kepala dan bukan kualitas isi kepala adalah pilihan politik yang sedang menjadi trend saat ini. Jadi, memaksakan kehendak lewat aksi massa untuk menekan pengadilan dan parlemen adalah pilihan yang paling sering digunakan dalam lima tahun terakhir.

Bagi massa yang murka, terlihat bahwa hukum yang lahir dari aspirasi warga dan hasil konsensus bersama warga negara lewat wakil-wakil mereka di legislatif dan pemerintahan, atau yang disebut sebagai keadilan politis, justru dipandang oleh para kaum sentimental sebagai sesuatu yang anti keadilan. Bagi kerumunan yang murka, keadilan yang hakiki hanya bersumber dari agama, suku atau nilai-nilai partikular mereka. Dalam kasus Indonesia, tersingkap realita bahwa dengan menggerakkan massa, kelompok tertentu memaksa agar negara harus tunduk pada konsep-konsep dan nilai-nilai partikular mereka. Mereka beralasan bahwa nilai ajaran agama adalah sesuatu yang turun dari Tuhan, sehingga tidak mungkin salah. Sedangkan hukum adalah hasil konsensus politik dan apalagi digunakan oleh negara sebagai alat kriminalisasi. Padahal membelokan ajaran Tuhan untuk kepentingan politik dan perebutan kekuasaan juga jelas merendahkan Tuhan itu sendiri.

Singkatnya, dalam praktek politik populisme yang terjadi adalah pemaksaan keadilan pra politis tertentu, untuk dijadikan sebagai hukum atau aturan bersama dalam negara atau polis. Padahal sebagaimana kita bisa membedakan antara masyarakat dan negara, kita juga dapat membedakan mana yang disebut keadilan pra politis dan mana yang disebut keadilan politis. Jika orang memaksakan pemahaman etnosentrisnya masuk ke dalam kehidupan bersama dalam negara atau polis, maka yang terjadi adalah mereka sedang memindahkan aturan dalam rumah tangga kelompok mereka menjadi hukum untuk mengatur kehidupan dalam negara. Padahal siapa pun paham bahwa hukum adalah panglima. Di mana, hukum atau undang-undang itu lahir dari nilai-nilai yang sudah disepakati bersama oleh warga sebuah negara. Hasil kesepakatan bersama warga negara itu akan ditaati karena dianggap adil bagi semua. Inilah yang disebut sebagai keadilan politis.

Berbeda halnya ketika yang bersepakat soal nilai-nilai itu hanya dalam konteks suku atau agama tertentu, maka itu disebut sebagai hukum dan aturan domestik. Aturan jenis ini disebut sebagai konsep keadilan pra politis. Keadilan pra politis itu baik, selama hanya digunakan untuk mengatur kelompok, entah suku maupun agama. Karena nilai-nilai primordial yang kita timbah dari budaya, agama, dan pandangan hidup tertentu tentu baik untuk panduan hidup dalam konteks komunitas. Akan menjadi masalah ketika itu dipaksakan menjadi aturan negara. Sebab belum tentu nilai tersebut sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai yang dihayati warga negara moderen. Contohnya adalah, aturan harus ke gereja pada hari Minggu karena Minggu adalah hari Tuhan tentu sesuatu yang baik bagi orang Kristen. Itu aturan yang adil bagi orang Kristen karena lahir dari ajaran iman mereka. Tetapi, ketika aturan yang dianggap adil menurut orang Kristen ini dipaksakan menjadi aturan dalam negara pluralistik seperti Indonesia, maka yang terjadi adalah ketidakadilan. Sebab, tidak semua warga negara Indonesia itu beragama Kristen. Juga karena hukum atau aturan gereja adalah keadilan pra politis yang hanya adil bagi orang Kristen. Bukan sebuah keadilan politis yang dihasilkan dari hasil konsensus bersama warga negara sehingga adil bagi semua.

Sehingga apa yang terjadi di Indonesia setengah dekade terakhir adalah meningkatnya gerakan murka atas nama demokasi. Atas nama demokrasi tapi realitanya adalah anti demokrasi. Sebab aksi-aksi ini menerjang prosedur-prosedur demokrasi dalam negara hukum demokratis. Inilah bukti nyata betapa tubrukan antara keadilan pra politis dan keadilan politis itu nyata di Indonesia. Masih ada kegagahan untuk membedakan mana yang adil

menurut konsep keadilan pra politis dan adil menurut konsep keadilan politis. Sederhananya adalah, masih adanya tubrukan antara pemahaman atau pandangan adil dan tidak adil menurut ajaran kelompok partikular (keadilan pra politis) dan keadilan menurut negara (keadilan politis). Akan menjadi sangat aneh ketika keadilan yang menjadi bagian keyakinan tertentu atau pandangan tertentu, dipaksakan menjadi suatu hukum yang berlaku bagi semua.

Artinya, masih banyak warga negara yang gagal paham akan apa yang dalam filsafat politik disebut sebagai *the idea of the good* dan *the idea of the right*. Apa yang disebut *the idea of the good* atau konsep-konsep pra-politis tentang keadilan tidak bisa serta-merta dianggap adil menurut warga sebuah negara. Hanya *the idea of the right* atau konsep politis tentang keadilan yang dapat diterima oleh semua warga negara. Karena konsep-konsep politis ini lahir dari hasil konsensus bersama semua warga negara. Nilai-nilai iman sebuah agama tidak bisa dipaksakan secara membabi-butakan menjadi bagian dari konstitusi negara. Kecuali isi epistemik iman itu didialogkan dan menghasilkan konsensus. Misalnya, hasil konsensus tentang aturan berlalu-lintas yang menjadi UU. Atau aturan hukum tentang perburuan, tenaga kerja, perbankan, pendidikan, kesehatan, atau tentang pers dan UU IT atau informasi dan teknologi. Semua wujud UU adalah konsep keadilan politis yang untuk meminjam teori kontrak sosial, pasti dipatuhi oleh setiap warga yang sudah menyatakan dirinya menjadi bagian dari warga sebuah negara moderen. Tanpa hal itu, kekacauan akan tercipta dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana tesis Budi Hardiman bahwa, apa yang secara pra-politis dianggap adil, belum tentu adil secara politis karena keadilan politis menuntut persetujuan semua pihak dalam bentuk undang-undang.

4.4. Aturan Oikos Menginvasi Kehidupan Polis

Meskipun bangsa Indonesia mengenal asas kekeluargaan dalam hidup sosial kemasyarakatannya, tetapi mengurus negara dengan asas kekeluargaan adalah berbahaya. Kehidupan politik adalah kehidupan dalam negara. Dan itu hanya dapat diatur oleh hukum. Bukan diatur dengan pertimbangan adat-istiadat sebagaimana dalam keluarga. Mengurus urusan warga negara dalam polis dengan pendekatan privat bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan oleh teori negara moderen. Segala urusan polis, diatur dengan hukum yang termanisfikasi dalam undang-undang. Sedangkan urusan privat diatur oleh kebudayaan. Jadi, tidak bisa dibolak-balik. Dalam kasus Indonesia, gerakan massa coba memaksakan agar aturan privat dipakai untuk mengatur kehidupan warga negara dalam polis. Meskipun sudah jelas bahwa tidak ada pertentangan antara aturan privat dan polis,

karena berbagai nilai budaya dapat mendukung proses *law enforcement*, apabila diterapkan dengan benar, tetapi menempatkan sesuatu yang benar pada tempat yang salah adalah fatal. Menurut Ignas Kleden, prinsip yang benar adalah *put the right thing in the right place*, artinya tempatkan hal yang benar di tempat yang benar. Bukan sebaliknya, menempatkan hal yang benar di tempat yang salah. Hal yang terjadi di Indonesia sejak Pilgub DKI hingga Pilpres 2019 adalah banyak orang yang murka sedang coba menempatkan hal yang benar di tempat yang salah. Akhirnya, tata negara Indonesia sebagai negara hukum moderen sedang terancam rusak. Dalam bahasa ilmu politik, kehidupan keluarga atau *oikos* adalah *private sphere* (wilayah privat) sedangkan kehidupan dalam negara atau *polis* adalah *public sphere* (wilayah publik).

Dalam aksi massa yang terjadi pasca Pilpres 2014, hingga dipenjarakannya Ahok dalam Pilkada DKI juga pertarungan politik yang begitu panas dalam Pilpres 2019, aturan main dalam *oikos* atau *private sphere* justru dipaksakan menjadi aturan hukum dalam *polis*. Aksi massa berjilid-jilid saat itu, selain akibat sentimentalitas dan berbagai masalah sosial dan ketimpangan ekonomi, juga dilatari oleh kebingungan memahami urusan *private* dan publik, atau antara *oikos* dan *polis*. Masyarakat gagal memahami bahwa urusan pemilihan Gubernur dan Presiden adalah urusan *polis*. Politik dan pemilu diatur dengan konstitusi negara. Penggunaan nalar dan ketaatan pada aturan main yang berdasarkan hukum dan undang-undang adalah wajib. Itulah perwujudan prosedur demokrasi. Jadi, apabila yang terjadi adalah penggunaan aksi massa untuk menekan pengadilan maka prosedur hukum sedang diterjang. Hakim tentu akan sulit untuk berlaku imparial dalam tekanan massa. Selain itu, prosedur demorkasi juga diterjang karena para pemilih akhirnya harus memilih dalam ketakutan. Ketika mayat seorang nenek ditolak untuk disholatkan di masjid hanya karena memilih Ahok, warga lainnya merasa takut untuk melakukan hal yang sama. Mereka termakan doktrin agama untuk memasuki bilik suara.

Penggunaan isu penistaan agama juga isu Cina Kafir sebagai komoditas politik adalah manifestasi dari instrumentalisasi agama untuk perebutan kekuasaan. Ini sikap anti demokrasi karena warga negara tidak lagi digiring untuk menjadi pemilih rasional yang memilih karena preferensi kinerja, rekam jejak, serta program sang calon. Atau tidak lagi dicerdaskan untuk melampaui loyalitas-loyalitas primordial. Tetapi sebaliknya ditenak seperti domba dan diajarkan untuk memilih berdasarkan preferensi primordial dan sentimen. Pemilih dibingklai untuk melihat bahwa pertarungan elektoral bukan hal lumrah dalam demokrasi untuk memilih pemimpin dalam agenda lima tahunan tetapi pertarungan antara

mayoritas vs minoritas. Antara yang kafir vs yang religius. Antara kebaikan versus yang batil. Padahal, masalah keselamatan di akhirat dan masuk surga bukanlah soal memilih siapa dalam pemilu, tetapi soal mengamalkan iman dengan Tuhan dan sesama manusia.

Akibatnya, di Indonesia dalam lima tahun terakhir, isu agama dan etnisitas tidak masuk ke diskursus publik di ruang publik politis sebagai sebuah tema yang bisa diolah secara rasional dan nalar, tetapi digunakan untuk merantai pemilih emosional, sentimentil dan fanatik. Masyarakat dirantai seolah-olah pemilihan Gubernur DKI adalah pemilihan kepala suku atau pemilihan pemimpin agama. Dan lebih fatal lagi, seolah-olah pemilihan tersebut berkaitan dengan surga dan neraka. Mereka yang memilih Cina dan kafir akan masuk neraka. Akhirnya apa yang seharusnya hanya ada di ruang privat yang berkaitan dengan urusan iman seseorang, dipaksakan untuk menjadi urusan publik. Jadi telah menjadi jelas bahwa apa yang sudah tegas diatur dalam negara hukum moderen, bahwa ada pemisahan antara yang privat dan publik tidak seluruhnya berlaku di Indonesia.

Kekalahan Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta adalah bukti bahwa stigma sebagai penista agama oleh sebuah video yang sudah diedit Buniyani, sukses menurunkan elektabilitasnya secara tajam. Selain itu, dia juga masuk penjara karena proses hukumnya berlangsung dalam tekanan massa yang sangat hebat. Sebuah situasi politik yang penuh nuansa memecah belah, yang belum pernah terjadi sejak Indonesia merdeka. Situasi yang juga berlanjut hingga Pilpres 2019 dan berakhir rusuh hebat pada 22-23 Mei 2019. Rakyat lalu masih terbelah hingga saat ini dalam formasi kawan vs lawan juga cebong vs kampret. Padahal, ketika kontestasi elektoral yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan, rekam jejak, dan program, di-downgrade menjadi urusan suci atau tidak suci sebagaimana dalam ajaran agama, maka yang terjadi adalah urusan *polis* sudah diurus dengan aturan dalam *oikos*.

4.5. Populisme Kanan dan Instrumentalisasi Sentimentalitas yang Berujung Brutalitas

Hal berikutnya yang bisa dipotret dari kondisi perpolitikan di Indonesia sejak 2014 hingga 2019 adalah, sering kali muncul dramturgi politik yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Massa ini meskipun mengatasnamakan demokrasi tetapi justru membahayakan asas fairness yang merupakan dasar demorkasi. Sebab, dalam negara hukum, setiap warga negara harusnya menggunakan saluran hukum dan konstitusi untuk menyampaikan protes dan keberatan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini ternyata dipicu oleh sentimentalitas yang berbasis agama. Sentimentalitas ini difasilitasi oleh media-media sosial dan dipelihara untuk kepentingan politik. Dalam kasus Indonesia, kebanyakan orang

lebih banyak mengarahkan matanya ke gawai di tangan, lalu lupa melihat dunia nyata di depan mereka. Akibatnya, dalam situasi Pemilu sebagaimana Pilkada DKI dan Pilpres 2019 yang begitu brutal, orang menjadi destruktif karena sangat sentimentil setelah termakan hasutan dan narasi-narasi kebencian yang diframing media dan para penyebar hoax. Banyak pemilih yang terhasut hoax, sulit untuk berpikir rasional.

Politik dan demokrasi di Indonesia lima tahun terakhir akhirnya menjadi afirmasi telak terhadap tesis yang diajukan oleh Budi Hardiman tentang bangkitnya politik populisme terutama populisme kanan. Bahwa prosedur-prosedur demokrasi diterjang karena sentimentalitas digunakan untuk menggerakkan massa yang murka. Padahal rasa persekutuan, apalagi persekutuan karena seagama atau sealiran, kemudian digunakan sebagai alat politik untuk menerjang prosedur-prosedur demokrasi, adalah anti politik dan anti demokrasi.

Memang ada dua hal yang berbeda soal gerakan massa. Apabila gerakan massa itu dilakukan oleh inisiatif para warga negara untuk menyalurkan aspirasinya yang dilakukan dalam kerangka sistem hukum negara, maka itu adalah gerakan demokratis warga. Dalam studi politik dikenal dengan *civil society*. Sebaliknya gerakan warga yang digerakan oleh tokoh atau pemimpin (man behind the gun) beserta provokator aksi dengan cara menerjang sistem hukum untuk mendikte pemerintah dan pengadilan, atau melawan pemerintahan yang sah, maka ini disebut sebagai gerakan populisme kanan. Apa yang dalam studi politik disebut sebagai politik populisme dan populisme kanan ini bisa terjadi karena adanya provokasi dan narasi-narasi rasis yang sukses membangkitkan sentimentalitas atau rasa persekutuan.

Dalam hal sekumpulan besar orang sedang membiarkan dirinya diperalat untuk digerakan dalam kerumunan yang murka, apakah dengan uang yang disusupkan ke saku atau lewat intimidasi dan teror atau lewat doktrin radikal agama, sebagaimana yang dilakukan dalam Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2019, untuk tujuan-tujuan politik yang mungkin tidak mereka pahami, maka yang terjadi di sana adalah gerakan populisme kanan. Dalam kasus Indonesia, bisa dibaca bahwa gerakan massa yang terkoordinasi oleh pemimpin-pemimpin yang kadang tampil, memang menginginkan pergantian kekuasaan lalu menggunakan simbol agama untuk melakukan gerakan yang bertagline religius. Sebab, salah satu ciri mencolok dari populisme kanan sebagaimana dikatakan Budi Hardiman adalah perlawanan terhadap elit yang sah dan pluralitas. Bisa dilihat dalam aksi-aksi massa selama lima tahun terakhir bahwa kerumunan yang murka dengan ditopang oleh kekuatan pasukan cyber

yang terkoordinasi di media sosial, mereka mampu menyebar sentimen anti pemerintah, sentimen agama, rasisme dan anti-partai. Mereka membangkitkan kebencian terhadap pemerintah bukan karena rezim itu lalim, tetapi karena para pemimpin di belakang mereka menginginkan kursi kekuasaan. Sehingga mereka membenci politik perwakilan. Lembaga DPR tidak lagi dihormati sebagai wakil mereka dalam komunikasi politik. Massa yang mengaku melakukan gerakan konstitusional karena gerakan massa adalah sah dalam demokrasi, meyakinkan rakyat banyak bahwa kerumunan mereka yang turun ke jalan adalah orang-orang yang punya hati dan tujuan mulia. Mereka lebih baik ketimbang para elit. Sedangkan rakyat yang tidak ikut turun ke jalan adalah penjilat elit dan pemain aman atau pendukung elit. Mereka lupa bahwa dalam keadaan yang penuh kebencian akibat dibakar oleh nafsu politik, atau oleh sentimen anti minoritas, atau anti pemerintahan yang sah, mereka sedang mengalami apa yang oleh Plato disebut sebagai situasi ketika “kepala dikooptasi oleh selangkangan.”

Secara umum, populisme kanan memang sedang bangkit di beberapa negara di dunia. Para pemimpin politik seperti Bolsonaro dan Trump membakar emosi massa dengan ujaran-ujaran kebencian, baik kepada pemerintahan yang sah, kepada para imigran, dan minoritas di negara tersebut untuk tujuan politik dan ekonomi. Di Indonesia, dalam kasus Pilkada DKI dan Pilpres, terlihat bahwa populisme kanan hadir dalam wujud yang agak berbeda. Ketersinggungan akibat isu penistaan agama membangkitkan amarah massa. Sebuah kondisi yang bias disebut sebagai hiperreligius. Dalam situasi inilah, para pemimpin politik masuk dan menggerakkan massa yang murka itu untuk tujuan politik. Lewat narasi-narasi kebencian dan tuduhan penistaan agama, massa yang murka lalu turun ke jalan menekan pemerintah juga mengintimidasi pengadilan.

Gerakan massa di Indonesia menjadi demikian bebasnya dan sukses misalnya dalam Pilgub DKI Jakarta karena pertama, Indonesia adalah Negara demokrasi. Ketika gerakan ini berlangsung dalam Negara dengan sistem demokrasi yang memberi kebebasan berpendapat dan berserikat, maka tentu saja sulit dibatasi. Apalagi kebanyakan gerakan menggunakan tagline religius. Tagline ini telah membuat gerakan ini mendapat dukungan yang sangat luas dari yang sepaham. Baru pada saat massa yang terprovokasi melakukan aksi anarkis dan subversif dalam beberapa aksi sejak 1411 hingga 22-23 Mei 2019, baru terlihat bahwa panji religius mulai dipertanyakan.

Kedua, dalam kasus Pilgub DKI Jakarta juga dalam pilkada serentak 2018 hingga Pilpres 2019 terror massa menjadi demikian berhasil

mendestabilisasi negara karena ditopang oleh media social. Terungkap dalam gerakan ini bahwa lewat bantuan media sosial yaitu twiter, WhatsApp, Line, Facebook, dll, narasi-narasi sentimental yang meracuni ruang-ruang publik dipompa dan masif disebar. Hoax atau berita bohong dan ujaran-ujaran kebencian yang sangat mengerikan inilah yang memicu banyak orang untuk marah. Terungkap fakta lainnya juga bahwa narasi kebencian yang disebarkan dalam lima tahun terakhir entah terhadap para elit politik yang menjadi lawan politik, maupun terhadap etnis tertentu, belum pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Propaganda-propaganda dan provokasi-provokasi inilah yang kemudian sukses mengkonsolidasi massa yang murka untuk turun ke jalan menekan pemerintah juga membelah masyarakat antara kawan dan lawan.

Secara politik, penggunaan sentimentalitas yaitu sentiment agama, memang bagian dari strategi politik. Dan itu sukses karena Ahok pun kalah di DKI dan dipenjara dua tahun. Tetapi jika ditelisik lebih dalam, penggunaan isu agama adalah pertama, anti demokrasi karena menerjang prosedur hukum dan jalur komunikasi politik yang konstitusional dalam Negara hukum demokratis. Kedua, merendahkan kemuliaan agama itu sendiri. Gerakan massa yang berujung brutalitas dan mendestabilisasi Negara juga mengungkap dua hal mendasar bahwa populisme kanan selalu mengekspresikan wataknya yang otoriter dan barbar. Massa merasa bahwa kehendak mereka harus diikuti karena mereka mengandalkan jumlah. Padahal hukum tidak bias tunduk pada jumlah kepala tetapi pada data dan fakta serta jumlah isi kepala. Mendikte pengadilan dengan jumlah kepala yang sudah marah menciptakan semacam konstruksi sosial di masyarakat bahwa kehendak massa yang besar jumlahnya berada di atas hukum dan konstitusi negara.

Dampak lainnya adalah, semua orang dalam negara demokrasi seperti Indonesia, lalu berpikir bahwa dengan alasan demokrasi, mereka bias bebas berbuat dan bertindak menentang pemerintah termasuk bertindak anarkis. Atau bila perlu melawan hukum karena membela sesuatu seperti agamanya. Padahal massa sering lupa bahwa tanggungjawab individu seringkali raib dalam mentalitas gerombolan. Massa kadang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya menjadi korban dari sebuah desain politik tingkat tinggi dari para predator di Indonesia yaitu para oligarki Bisnis-Politik. Kelompok ini bertindak seperti bank murka yang memproduksi kerumunan massa karena memiliki uang dan pasukan penyebar hoax untuk bisnis aksi massa.

Praktek politik ini bisa muncul karena rasionalitas yang dihayati kebanyakan manusia

moderen, terutama para politisi di Indonesia adalah rasionalitas instrumental. Yaitu segala sesuatu hanya dipandang dari sisi kegunaannya semata. Ketika bisa digunakan sebagai sarana atau alat untuk meraih tujuan, maka apakah cara itu jahat dan buruk sekalipun, akan digunakan. Prinsip inilah yang membuat rasionalitas instrumental dalam politik itu berbahaya. Sebab entah cara itu brutal atau tidak, prinsipnya adalah tujuan tercapai. Tidak ada perhitungan soal nilai dan value kemanusiaan di sana. Inilah watak instrumental. Dan dalam dunia politik, nafsu berkuasa dan fanatisme politik bisa mengaburkan pandangan intelektual setiap orang. Sehingga segala sesuatu akan hanya dilihat dari aspek manfaat semata. Atau sebagai alat semata untuk meraih kekuasaan. Termasuk agama sekalipun. Dan ketika agama digunakan sebagai alat politik semata untuk meraih kekuasaan, maka yang terjadi adalah instrumentalisasi agama.

Dalam kasus Pilpres di Indonesia juga Pilkada DKI Jakarta, terbaca bahwa sentimentalitas itu benar-benar digunakan sebagai alat politik. Entah sentimentalitas yang berkaitan dengan kebencian pada suku, agama ataupun lawan politik yang berbeda latar belakang budaya dan agama. Sentimentalitas ini sengaja dikapitalisasi untuk membangkitkan kemarahan massa yang turun ke jalan untuk menekan pemerintah dan lawan politik. Inilah yang disebut sebagai instrumentalisasi sentimentalitas.

Massa yang murka bisa melakukan itu karena apa yang dikemukakan oleh Gustave Le Bon, bapak psikologi massa. Bahwa massa itu bodoh, bersikap seperti perempuan, mudah diprovokasi, bersikap rasistis atau singkatnya irrasional. Dalam hal ini, munculnya massa hingga berakhir rusuh dalam banyak aksi politik populisme lima tahun terakhir adalah karena watak mudah diprovokasi dan rasistik itu. Massa yang rusuh dan mati-matian mekasakan kehendak dan melawan aparat dalam banyak gerakan massa seperti dalam Pilkada DKI hingga menjelang dan pasca Pilpres 2019, dalam cara pandang Gustave Le Bon adalah orang-orang yang senantiasa terkungkung dalam batas-batas ketidaksadaran, tunduk pada segala pengaruh, mudah diombang-ambingkan oleh emosi dan mudah percaya. Mereka hanya bisa survive lewat kemampuan mereka untuk mengeroyok. Sehingga Sigmund Freud menyebut aksi massa sebagai "regresi ke aktivitas psikis yang primitif,bangkitnya kembali gerombolan purba dalam diri kita.

Dalam pandangan Budi Hardiman akar kekerasan masa sebagaimana dalam Pilgub DKI Jakarta, dan rusuh yang hampir membuat negara chaos dalam aksi massa pada 22-23 Mei 2019 lahir dari tiga akar yaitu akar epistemologis, yang berkaitan dengan proses pengenalan manusia terhadap manusia lainnya. Massa yang murka memandang orang lain sebagai lawan karena sudah didoktrin dengan demagogi ras

juga hasutan penuh kebencian di media sosial. Kekerasan bagi massa adalah 'kewajiban etis' demi menjaga keutuhan kolektif mereka. Berikutnya adalah akar Antropologis, di mana massa dalam rusuh ketika itu melakukan rusuh tidak secara spontan/naluri, melainkan karena mereka percaya pada nilai/makna yang mereka perjuangkan yaitu bahwa kebenaran versi mereka harus ditegakkan, meskipun itu dengan rusuh dan kekerasan. Mereka yang sudah murka sudah kehilangan pegangan sosial dan mengalami ketidakpastian, sehingga tindakan brutalitas dan kekerasan menjadi cara mereka memperoleh kepastian. Para perusuh mengalami guncangan ego sehingga ego yang panik menggunakan kekerasan sebagai pembuktian eksistensi.

Selain itu, gerakan murka dan brutalitas yang terjadi saat rusuh juga dipicu oleh akar Sosiologis. Yaitu karena massa yang kehilangan pegangan secara personal merasa bahwa menggabungkan diri ke dalam kerumunan dan melakukan tindakan destruktif dan brutal adalah jalan untuk menegaskan ego diri mereka yang panik. Lewat penegasan kekuatan kelompok mereka, massa merasa kuat dan strong. Artinya, ketidakberdayaan individu untuk bertindak sendiri, membuat mereka harus meminjam wajah massa agar leluasa bertindak. Dalam bahasa Budi Hardiman, massa mengurangi rasa tanggungjawab personal anggotanya.

Secara epistemic ditemukan juga fenomena sosial baru bahwa, dalam kasus politik populisme Indonesia, berbagai teror massa selama lima tahun ini menjadi demikian hebat memberi efek kejutan dan tekanan ke pemerintah karena bantuan media sosial. Jika bukan karena media sosial, amplifikasi isu gerakan massa dalam aksi-aksi tersebut tidak sebesar itu. Cara lama mengumpulkan massa lewat demagogi rasis dalam sidang rakyat dan teater rakyat, sudah tidak banyak dipakai karena hari ini hanya lewat livestreaming, youtube dan video yang diviralkan, massa yang teragitasi bisa langsung turun ke jalan. Artinya, dalam kasus Indonesia, para provokator benar-benar memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Dengan kata lain, instrumentalisasi sentimentalitas terutama agama, menjadi sangat ampuh menggerakkan massa yang murka di Indonesia karena topangan media sosial. Jutaan akun palsu yang digerakan secara terstruktur sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Saracen dan Muslim Cyber Army yang sudah diungkap polisi adalah contoh generator penggerak massa yang sukses selama Pilkada DKI dan Pilpres. Jejaring penyebar hoax dan propaganda rasis di media sosial sejak pasca Pilpres 2014, dan menjadi sangat brutal dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, juga Pilkada serentak 2018, dan Pilpres 2019 ini adalah medium yang sukses membuat bangsa Indonesia terbelah. Orang digiring pada opini seolah-olah

masalah perebutan kekuasaan dalam politik adalah pertarungan antar agama.

Padahal ketika agama digunakan untuk motif-motif politik maka agama sudah direndahkan sebagai alat perebutan kekuasaan belaka. Selain itu, massa yang murka sering tidak paham bahwa konflik, baik yang vertikal, horizontal, ataupun diagonal kadang adalah hasil ciptaan para oligarki ekonomi-politik yang punya motif perebutan kekuasaan. Jadi sikap kritis melihat bahwa agama bisa saja sedang dipakai sebagai alat pemicu solidaritas semata adalah penting. Karena banyak akar konflik politik adalah karena perebutan atas sumber daya-sumber daya ekonomi dan politik yang jumlahnya memang sangat terbatas sedangkan mereka yang menginginkannya sangat banyak.

4.6. Menjaga NKRI, Mengantisipasi Sindrom Orang Tertindas dan Fundamentalitas

Untuk menjaga keutuhan Negara, tesis Filsuf Jean Paul Sartre menjadi relevan bahwa sebuah sistem politik (negara) yang ditakdirkan untuk runtuh, biasanya akan merangsang banyak orang untuk mempercepat keruntuhannya. Dalam kasus Indonesia, antisipasinya lewat beberapa cara yaitu merawat rasionalitas publik dengan memperbesar kelas menengah yang moderat dan inklusif dalam cara pandang, menegakan hukum sebagai sabuk pengaman demokrasi juga penting. Serta menata kembali hukum yang tegas untuk lalu-lintas komunikasi di dunia maya atau hukum di media sosial. Sebab brutalitas komunikasi dan provokasi rasis di media sosial sangatlah berbahaya. Juga yang tentu penting adalah mengantisipasi munculnya solidaritas dan kerumunan akibat sentimentalitas secara umum. Entah yang berkaitan dengan suku, agama, rasa dan sebagainya.

Selain itu, terbaca juga bahwa dramaturgi politik massa kadang lahir dari "sindrom orang tertindas". Dalam praktek politik di Indonesia, sindrom jenis ini sering dikapitalisasi secara politik untuk meningkatkan amarah dan solidaritas warga. Dalam kasus Ahok atau dalam Pilpres misalnya, ada kelompok dan tokoh yang mengkampanyekan isu penistaan dan kriminalisasi. Jargon "dikriminalisasi" ini lalu memunculkan solidaritas untuk pembelaan terhadap sang tokoh. Juga yang nampak adalah muncul gerakan pembelaan terhadap kelompok terutama agama yang diasosiasikan sebagai yang "dinista" atau tertindas. Ini bahayanya politik sehingga Plato bahkan sudah memperingatkan sejak lama bahwa, persandingan demokrasi kerumunan dan sentimentalitas akan membuahkan ketidakadilan. Karena mental massa dalam kerumunan itu sentimental. Artinya mereka rentan sekali untuk dimanipulasi.

"Sindrom orang tertindas" sejak lima tahun terakhir telah menjadi bagian dari pemicu protes yang kadang berujung rusuh. Untuk menjaga

NKRI, tentu saja sindrom ini harus diantisipasi. Sebab sindrom ini bagian dari sentimetalitas publik Indonesia. Secara politis, Negara harus mengkalkulasi hal ini sebagai potensi lain yang mengancam NKRI. Sindrom ini sering memunculkan tindakan dalam frame “yang lemah mengalahkan yang kuat”, “minoritas berjaya atas mayoritas,” “yang benar mengalahkan yang batil”, atau mungkin juga “yang santun mengalahkan yang kasar.” Sebuah strategi psilogis politis yang sangat sering ditemukan dalam politik praktis Indonesia dan sudah dipakai banyak pihak untuk mencari untung dalam politik. Karena itu, Negara harus mengantisipasi ini dengan hukum yang tegas dan imparsial. Agar kasus apa pun jangan sampai melahirkan sindrom orang tertindas yang kemudian dipakai sebagai bagian dari strategi politik. Sebab itu berbahaya bagi keutuhan NKRI.

Juga yang penting diantisipasi adalah fenomena lahirnya etnosentrisme dan fundamentalisme agama. Kedua hal ini menjadi daya sihir baru dalam politik Indonesia dalam lima tahun terakhir sejak Pilpres 2014. Di masa lalu, sejak Orde Lama dan Orde Baru kebangkitan fundamentalis agama dan etnosentrisme juga pernah terjadi. Tetapi saat itu militer dan birokrasi sangat represif dan mendominasi panggung politik Negara sehingga keduanya bisa diredam. Tetapi sejak era reformasi, kebangkitan fundamentalisme agama dan etnosentrisme masif terjadi. Juga karena dimediasi oleh demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia. Demokrasi yang terlalu liberal yang menjamin hak berkumpul dan menyatakan pendapat, membuat semua orang merasa sangat bebas. Kebebasan yang terlalu ekstrem yang dijamin oleh negara ini membuat aparat hukum sulit menangkap dan menahan orang yang dicurigai terpapar radikalisme. Sehingga ketika akumulasi gerakan senyap ini mendapat momentumnya dalam politik, maka langsung meledak sebagaimana dalam Pilpres 2014, kemudian menjadi sangat brutal diekspresikan dalam Pilkada DKI Jakarta dan puncaknya dalam Pilpres 2019.

5. Kesimpulan

Diskursus di atas telah menyingkap beberapa hal mengenai teror massa dan penggunaan politik populisme di Indonesia yang mungkin sejauh ini luput dari perhatian. Bahwa, sebagai gerakan oposisional dalam demokrasi, populisme kanan harus diakui secara langsung sudah mengancam negara hukum demokratis. Secara epistemik bisa dikatakan bahwa pertama teror massa secara langsung telah mengancam negara hukum demokratis dari sisi sistem. Fakta bahwa gerakan-gerakan yang menggunakan kekuatan massa dalam jumlah ginatis berhasil mendestabilisasi negara, yaitu lewat brutalitas dan gerakan murka yang ditujukan untuk menekan parlemen, mendikte pemerintah, juga

mengancam pengadilan dan polisi, maka jelas bahwa populisme kanan tidak sejalan dengan demokrasi. Kedua, dari sisi masyarakat warga, gerakan populisme kanan mempunyai dampak yang destruktif. Antara lain meracuni ruang-ruang publik dengan berita-berita bohong, ressentiment, dan ujaran-ujaran kebencian baik terhadap elit, ras tertentu seperti Cina dan kaum minoritas agama yang distigma kafir atau para pendatang. Dengan topangan media sosial dalam jejaring digital dan terutama akun-akun palsu yang dimobilisasi secara masif dan terstruktur untuk menyebarkan hoax dan ujaran kebencian, masyarakat pun terbelah dalam formasi kawan vs lawan. Politik akhirnya bukan menjadi solusi mencapai *bonum comune* tetapi justru membelah bangsa dan memundurkan demokrasi.

Terhadap NKRI, diskursus ini bisa memberi beberapa alternatif pandangan yang boleh diperdebatkan. Tetapi demi menjaga NKRI dari ancaman disintegrasi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, pentingnya mempertahankan sistem demokrasi. Mengatakan bahwa demokrasi telah gagal dan menjadi akar persoalan sehingga akar persoalannya akan tercabut dengan mengganti demokrasi adalah sikap totaliter dalam berwacana. Karena ketika kita menganggap bahwa akar semua persoalan sudah ditemukan, secara langsung kita telah mengklaim bahwa kita telah menemukan jawabannya dan itu sama halnya dengan memaksa orang lain untuk turut serta dan tidak berpeluang menemukan jawaban berbeda dengan kita. Jika demokrasi harus diganti, bisa saja bagi orang lain, masalahnya bukan pada demokrasi tapi pada manusia Indonesia. Jadi sikap totaliter seperti ini harus dihilangkan. Karena klaim menemukan kebenaran dan kebenaran itu final adalah watak otoriter. Padahal setiap klaim harus selalu siap direvisi secara nalar dan argumentatif. Ilmu yang tunduk pada asas logosentrisme sangat berbahaya, apalagi dalam pengkaji persoalan negara dan masyarakat. Apa yang dikatakan Ignas Kleden tentang peribahasa dalam sosiologi bisa membantu menjelaskan ini. Bahwa, “siapa yang hanya mempunyai palu sebagai alatnya di tangan akan mengubah semua orang menjadi paku, dan siapa yang hanya mempunyai sapu sebagai alatnya akan mengubah semua orang menjadi sampah.”

Analogi ini melukiskan betapa berbahayanya mengklaim menemukan akar persoalan negara, karena apa yang menjadi akar pada dasarnya adalah apa yang dianggap sebagai akar masalah. Pemilihan dan penetapan anggapan ini memang didasarkan pada sejumlah pengetahuan. Tetapi apa jadinya kalau pengetahuan tersebut keliru, sementara kita telah mengorbankan demikian banyak orang? Pemikiran fungsionalisme ini sangat kuat ditunjang oleh pemikiran mekanistik dalam ilmu-ilmu sosial, sehingga klaim semacam ini harus ditolak.

Demokrasi meski punya banyak kekurangan, tetap harus diakui masih menjadi pilihan terbaik. Bukan karena demokrasi dapat meniadakan kelemahan manusia dan keteledoran masyarakat, tetapi melalui debat dan deliberasi gagasan di ruang-ruang publik, demokrasi memberi kemungkinan perbaikan kelemahannya itu. Dengan kontrol terus-menerus melalui komunikasi politik tanpa batas, segala keteledoran dalam negara bisa dikurangi. Juga dengan peringatan terus-menerus tanpa batas dan perbaikan terus menerus tanpa henti, di setiap etape dan zaman dengan bantuan intelektualitas generasi masyarakat yang sadar dan rasional, demokrasi bisa diperbaiki menjadi sejalan dengan kebutuhan zamannya.

Sehingga berpikir bahwa mengganti demokrasi apalagai lewat gerakan fundamentalisme dan radikalisme adalah keliru. Itu hanyalah pelipur lara yang lahir dari harapan akan penyelesaian yang cepat dan gampang akan masalah negara, padahal tidak ada negara yang bisa dibuat berubah sangat cepat seperti mengganti mesin. Negara adalah komunikasi antar manusia dalam masyarakat. Kualitas negara akan ditentukan oleh hal itu. Mengganti sistem dengan isi manusia yang kualitasnya sama, tidak akan mengubah apa pun selain penyesalan tiada akhir. Contoh soal Mesir yang dulunya otoriter lalu berubah karena revolusi bukannya menjadi demokratis, ternyata sudah kembali menjadi militeristik. Itulah contoh mengganti mesin tanpa perubahan kualitas manusianya. Sehingga bangsa Indonesia harus percaya bahwa melalui komunikasi dan debat terbuka yang berbasis nalar, semua nilai bisa ditransformasikan. Jika pandangan-pandangan pra-politis itu, seperti agama, budaya dan suku, atau kepentingan ekonomi, dll, bisa didialogkan terus menerus, semuanya pasti bisa membantu menguatkan negara dan bukan mendestabilisasi kesatuan. Karena dalam sejarah dunia, apa yang dahulu dianggap sulit berubah, dengan bantuan intelektualitas warganya, nilai-nilai itu bisa berubah.

Kedua, hal-hal yang juga perlu diawasi oleh negara agar NKRI bisa tetap ada adalah absolutisme agama di satu sisi dan sekularisme keras di sisi yang lain. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, absolutisme agama bukanlah satu-satunya patologi, tetapi kembarannya adalah patologi sekularisasi. Jika dalam pandangan sekularisme, agama dianggap irrasional, sehingga tidak berhak bersuara dalam ruang publik; Maka dalam agama ada fanatisme dan radikalisme, yang menolak perbedaan dan pluralisme pandangan hidup. Keduanya ini perlu terus berjumpa dalam dialog dan komunikasi yang deliberatif dan argumentatif di ruang-ruang publik agar tercipta proses saling belajar. Sekularisme juga harus mengakui bahwa kadang kebenaran nalar itu terbatas. Justru kebenaran juga bisa datang dari nilai-nilai dan isi

epistematik ajaran religius yang partikular dan primordial. Singkatnya, antara agama dan nalar atau antara sekularisme dan agama perlu adanya sikap “belajar ganda” yaitu saling menimbah isi epistematik nilai-nilai religius dan primordial yang justru baik dan berguna untuk hidup bersama secara sosial dalam negara demokrasi. Ketika nilai-nilai itu diterima secara nalar dan bisa masuk ke dalam konsep keadilan politis negara maka NKRI akan aman dari ancaman perpecahan.

Negara hukum demokratis seliberal apa pun tidak bisa menjadi semacam mesin legal-politis yang bergerak sendiri lepas dari sumber-sumber religius. sebab jangan lupa bahwa warga negara memiliki motivasinya untuk mematuhi hukum lewat orientasi-orientasi nilai yang antara lain juga bersumber dari nilai-nilai religius. Bahkan asas netralitas dan *fairness* yang mendasari praktik birokrasi moderen pun memperoleh tenaganya dari agama. Sehingga dengan memberi peluang bagi dialog publik bagi aspirasi- aspirasi religius, masyarakat negara demokratis seperti Indonesia sedang memberikan sikap fair terhadap kelompok-kelompok agama terlibat dalam demokrasi yang menguatkan negara itu sendiri.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Terima kasih kepada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memungkinkan penulis menghasilkan penelitian ini.

Referensi

- Anderson, B. 2008. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*, dengan Kata Pengantar oleh Daniel Dhakidae. Yogyakarta : Insist Press & Pustaka Pelajar
- Azra, A. 2010. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Jakarta
- Hardiman, F.B., 2010. *Massa, Teror, dan Trauma*. Jakarta : Penerbit Lamalera & Ledalero
- Hardiman, F.B., 2004. *Filsafat Moderen*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Hardiman, F.B., 2007. *Filsafat Fragmentaris*. Yogyakarta : Kanisius
- Hardiman, F.B., 2007. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta : Kanisius
- Huntington, S.P. 1995. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta : Grafiti
- Kleden, I., 2004. *Masyarakat Dan Negara: Sebuah Persoalan*. Magelang : Yayasan Indonesiatara
- Mitchell, C. 1981. *The Structure of International Conflict*. London : Macmillan
- Moleong, J.L., 2007. *Metodologi Penelitian*

- Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Purwanto, G.S., 1992. *Rasionalitas Manusia Menurut Max Horkhemier*. Yogyakarta.
- Rush, M., Althoff, P., 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rajawali Press
- Surbakti, R., 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Setiadi, E.M, Kolip, U., 2010. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Sudibyo, A. 2012. *Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan dalam Pemikiran Hannah Arendt*. Jakarta : Margin Kiri.
- Sindhunata. 1982. *Dilema Usaha Manusia Rasional (Kritik Masyarakat Modern Oleh Max Horkheimer Dalam Rangka Sekolah Frankfurt)*, Jakarta : PT Gramedia.
- Suseno, F.M., 2005. *Pijar-Pijar Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius.
- Taupan, M. 1989. *Demokrasi Pancasila*, Jakarta : Sinar Grafika
- .